

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi auditor merupakan profesi yang berbasis kepercayaan. Sebab, profesi ini ada karena masyarakat mempunyai harapan bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, kejujuran, serta objektivitas, sehingga jasa yang diberikan oleh auditor tidak memberikan suatu kerugian bagi para pengguna jasa audit.

Kasus kejatuhan ENRON sekaligus yang mengakibatkan tutupnya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen merupakan titik awal di mana kredibilitas akuntan publik atau auditor mulai diragukan. Walaupun kasus tersebut terjadi di luar Indonesia, tetapi dampaknya tetap dirasakan oleh kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Masyarakat, khususnya pengguna jasa audit mulai meragukan kualitas jasa yang diberikan oleh para auditor. Mereka tidak mempercayai kualitas keprofesionalan dari para auditor. Inilah yang disebut krisis kredibilitas yang sempat dialami di dunia akuntansi.

Sebagai bagian dari profesi akuntansi, auditor sering dinyatakan sebagai ujung tombak dari profesi akuntansi. Peran dari akuntan publik atau auditor adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya. Sehingga, para pengguna laporan keuangan sangat bergantung pada pendapat auditor terhadap laporan keuangan yang bersangkutan. Sebagai seorang

profesional, auditor dituntut untuk berpegang pada kode etik pemeriksaan dalam mengemban tanggung jawab profesinya. Tanggung jawab profesi tidak hanya berhenti sampai dia menyampaikan laporan kepada klien, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap isi pernyataan yang telah ditandatangani.

Karena pentingnya fungsi akuntan publik atau auditor ini, dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kredibilitas para akuntan publik agar kepercayaan masyarakat pada profesi ini tidak berkurang. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah melakukan upaya-upaya seperti mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan. Selain SPAP dan Kode Etik Akuntan, IAI juga mengeluarkan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) pada tahun 2001. Pernyataan ini menetapkan bahwa setiap kantor akuntan publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu, yang terdiri dari sembilan elemen pengendalian mutu yaitu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi.

Setiap kantor akuntan publik pada dasarnya mempunyai sistem pengendalian mutu sendiri-sendiri. Berdasarkan PSPM 01-03 menyatakan bahwa setiap kantor akuntan publik akan direview oleh dewan khusus yang dibentuk oleh IAI dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Badan ini nantinya akan bertugas untuk mengawasi dan menilai apakah kantor akuntan publik direviewnya telah memiliki, menetapkan, dan mentaati sistem pengendalian mutunya.

Sejauh ini jika kita perhatikan, sistem pengendalian mutu dari kantor akuntan publik hanya bersifat formalitas saja. Sistem pengendalian mutu ada hanya

sebagai aturan dan kadang-kadang sistem pengendalian mutu tidak sepenuhnya ditaati oleh kantor-kantor akuntan publik. Sebagai contoh, dalam sebuah laporan dari departemen keuangan, menyatakan bahwa banyak penyimpangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik pada waktu melakukan audit terhadap bank-bank yang bermasalah. Pada waktu itu pihak KAP memberi opini yang baik terhadap audit bank-bank tersebut, sehingga Bank Indonesia mengucurkan dananya kepada bank-bank tersebut dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyimpangan ini sangat merugikan negara, di mana pihak manajemen bank ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.

Akibat dari tidak diterapkannya sistem pengendalian mutu yang baik maka akan berdampak pada berkurangnya kredibilitas dari kantor akuntan publik. Oleh karena itu, maka perlu adanya pengawasan yang baik terhadap jalannya praktik-praktik kantor akuntan publik sehubungan dengan pelaksanaan sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas setiap kantor akuntan publik di mata masyarakat.

Pada dasarnya, penerapan sistem pengendalian mutu yang baik pada kantor akuntan publik adalah tergantung pada persepsi para auditor di dalamnya terhadap sistem pengendalian mutu tersebut. Jika persepsi para auditor terhadap sistem pengendalian mutu adalah baik dan benar, serta tidak menganggapnya sebagai formalitas belaka, maka mereka telah melakukan tanggung jawab profesionalnya seperti yang terdapat dalam sembilan elemen atau unsur sistem pengendalian mutu kantor akuntan publiknya. Dengan demikian, maka kualitas jasa yang diberikan para auditor akan semakin baik, atau dengan kata lain kinerja dari para

auditor akan semakin baik pula. Kinerja yang baik akan semakin meningkatkan kredibilitas auditor.

Perbedaan jenjang karir dalam sebuah kantor akuntan publik pun akan ikut mempengaruhi persepsi seorang auditor atas seberapa penting sistem pengendalian mutu diterapkan dan dilaksanakan di kantor akuntan publiknya. Seorang auditor junior dan auditor senior belum tentu memiliki persepsi yang sama akan hal itu. Pandangan seorang auditor yang baru masuk ke lingkungan kantor akuntan publik (auditor junior) terhadap sistem pengendalian mutu KAP akan berbeda dengan pandangan auditor yang lebih lama berada di kantor akuntan publik itu dan yang telah lebih dulu dekat dengan sistem pengendalian mutu KAP. Perbedaan persepsi itu jugalah yang akan mempengaruhi perbedaan kinerja diantara auditor junior dan auditor senior.

Berdasarkan hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pengaruh Persepsi Auditor Junior dengan Auditor Senior atas Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kinerja Auditor”**.

Dari uraian di atas, maka hipotesis-nol dan hipotesis-alternatif adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.

H_{a1} : Persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.

2. H₀₂: Persepsi auditor junior atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.
H_{a2}: Persepsi auditor junior atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.
3. H₀₃: Persepsi auditor senior atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.
H_{a3}: Persepsi auditor senior atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.
4. H₀₄: Kinerja auditor junior lebih baik dari kinerja auditor senior sehubungan dengan persepsi atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik.
H_{a4}: Kinerja auditor junior lebih kecil atau lebih buruk dari kinerja auditor senior sehubungan dengan persepsi atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi auditor junior atas sistem pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi auditor senior atas sistem pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kinerja auditor senior lebih baik dibandingkan kinerja auditor junior sehubungan dengan persepsi atas sistem pengendalian mutu KAP?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luas cakupan dari permasalahan yang ada, perlu dibuat batasan agar tidak terjadi salah interpretasi terhadap hasil dari penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk variabel persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik, peneliti hanya membahas sembilan elemen atau unsur dari sistem pengendalian mutu yaitu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi. Untuk variabel kinerja auditor, peneliti hanya membahas empat ukuran kinerja yaitu *technical and analitical skills*, *interpersonal skills*, *communication skills*, dan *profesional characteristic*.
2. Dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya dan waktu, maka lingkup penelitian akan dibatasi pada beberapa kantor akuntan publik di Bandung. Sedangkan responden yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah auditor junior dan senior yang bekerja pada kantor akuntan publik tersebut.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris sejauh mana hubungan penerapan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan identifikasi masalah yang ditetapkan, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi auditor junior atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi auditor senior atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor.
3. Untuk mengetahui apakah kinerja auditor senior lebih baik dibandingkan kinerja auditor junior sehubungan dengan persepsi atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik.

1.5 Manfaat Penelitian

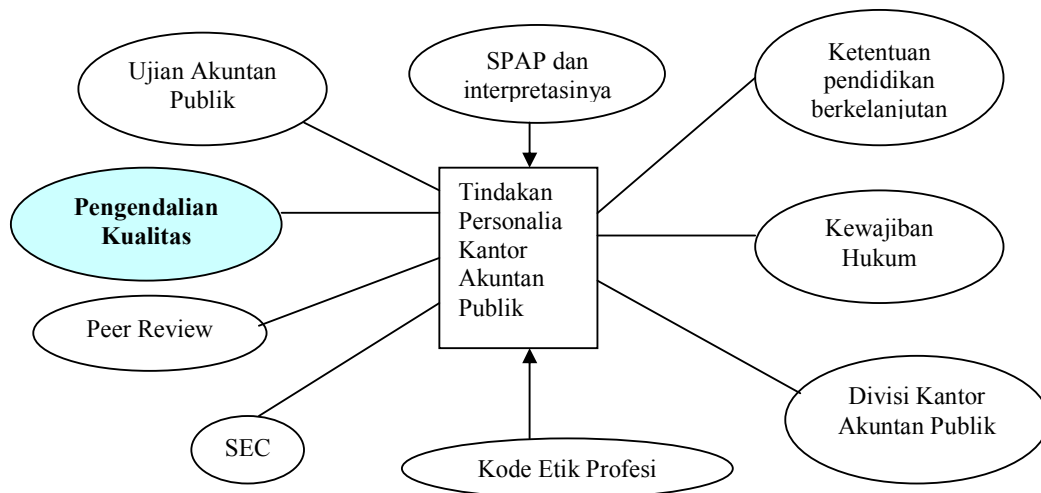
Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis: dapat memberikan wawasan tentang masalah persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik dan kinerja auditor sehingga didapat suatu gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara teori dan fakta yang diperoleh.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi kantor akuntan publik mengenai persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor.

1.6 Kerangka Penelitian

Di dalam bukunya, Arens (2003:121), dijabarkan cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik agar tindakan mereka berkualitas tinggi. Dikarenakan kantor akuntan publik memainkan peran sosial yang penting, maka profesi serta organisasi lainnya menyediakan mekanisme-mekanisme yang dapat meningkatkan tingkat kualitas audit yang tepat serta kode etik profesi. Hal tersebut diikhtisarkan dalam gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Cara profesi dan masyarakat mendorong tindakan akuntan publik berkualitas tinggi.



Dari gambar di atas dapat dilihat bagan yang bercetak tebal, bahwa salah satu cara atau upaya yang dilakukan profesi (di Indonesia IAI) untuk mendorong atau meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan oleh para auditor atau akuntan publik adalah dengan menetapkan pengendalian kualitas atau yang biasa disebut pengendalian mutu.

Suatu kantor akuntan publik harus memastikan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) telah dipatuhi dalam pelaksanaan setiap audit. Pengendalian kualitas merupakan prosedur yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa ia mematuhi standar-standar tersebut secara konsisten pada setiap penugasan auditnya (Arens, 2003:52).

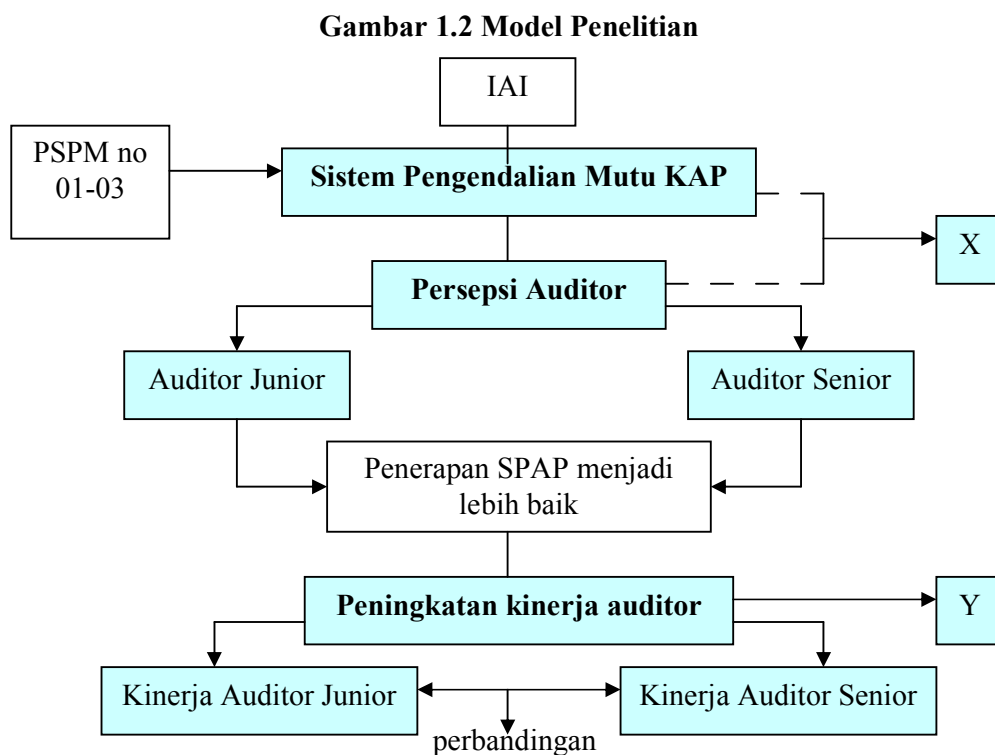
Sesuai dengan pernyataan standar pengendalian mutu (PSPM) no 01-03 yang dikeluarkan IAI, pengendalian mutu terdiri dari independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi. Melalui suatu pengendalian mutu yang baik maka para akuntan akan menerapkan SPAP dengan baik pada setiap penugasan guna memenuhi tanggung jawab profesional pada para pengguna jasa audit. Di samping itu, penerapan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik yang baik akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari para auditor sehingga auditor akan dapat memenuhi tanggung jawab profesi kepada para kliennya.

Pemenuhan tanggung jawab profesional seorang auditor dapat dilihat dari kinerja yang ditunjukkannya dalam setiap penugasan audit. Penilaian kinerja bagi para auditor merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jasa yang mereka berikan dapat memenuhi harapan bagi para pengguna jasa audit. Adapun ukuran kinerja terdiri dari:

- *technical and analytical skills*
- *interpersonal skills*

- *communication skills*
- *profesional characteristic*

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu pengendalian yang baik untuk memastikan agar para auditor dalam melaksanakan tugasnya dapat bersungguh-sungguh menggunakan keahlian, kemahiran, dan keterampilannya dalam mengaudit sesuai dengan norma, etika, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, terlihat sekali bahwa penerapan sistem pengendalian mutu yang baik (bagaimana auditor mempersepsikan sistem pengendalian mutu dari kantor akuntan publiknya) akan menciptakan suatu kinerja yang baik dari para auditor tersebut. Oleh karena itu, gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan kerangka pemikiran yang dibuat dalam model skema sebagai berikut:



Di mana variabel x adalah persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu KAP dan variabel y adalah kinerja auditor.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitiannya adalah penelitian kausal, maksudnya menguji pengaruh persepsi auditor junior dan auditor senior atas standar pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor. Dalam pengujian ini digunakan alat uji statistik yaitu uji pengaruh (regresi).
2. Penelitian ini juga membandingkan kinerja auditor senior dengan kinerja auditor junior sehubungan dengan persepsi atas sistem pengendalian mutu KAP. Dalam pengujian ini digunakan alat uji statistik yaitu uji parametrik *independent sample t-test*.
3. Kedua pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* statistik yaitu SPSS 12.0.

1.7.2 Prosedur Penentuan Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode random sederhana, yaitu penentuan sampel akan dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara random. Menurut Arikunto (2002:112), jika subjek penelitian besar atau lebih dari 100 maka jumlah sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih dari populasi atau subjek penelitian. Dalam

penelitian ini, jumlah populasi belum diketahui, sehingga jumlah sampel yang akan diambil diperkirakan sekitar kurang lebih adalah 40 sampel untuk auditor yang berada di KAP di Bandung.

1.7.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Study*)

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode *survey*. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang akan dikirimkan secara langsung dan disertai surat permohonan kepada pimpinan-pimpinan beberapa kantor akuntan publik yang ada di Bandung. Kuesioner yang telah diisi oleh para auditor sebagai responden akan dijaga kerahasiaannya. Penjelasan petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Study*)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang akan dijadikan sebagai sumber referensi untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor-kantor akuntan publik yang berada di daerah Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2008 sampai dengan selesai.